

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketidakmerataan pendidikan adalah salah satu faktor yang menghambat kemajuan pendidikan. UNESCO mengeluarkan kebijakan mengenai *Education For All* (pendidikan untuk semua) yang dideklarasikan tahun 1990 dan ditindaklanjuti dengan *deklarasi dakar* pada tahun 2000. Hal ini menggaris bawahi bahwa pendidikan dituntut untuk mampu menggapai seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat ras, agama, batas, serta kemampuan potensial pada peserta didik (Sujatmoko, 2016). Dalam kebijakan *Education For All* (EFA) dinyatakan bahwa setiap warga negara di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kebijakan ini merupakan gerakan global yang dibentuk oleh UNESCO dan memiliki tujuan untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi setiap anak usia sekolah.

Deklarasi EFA sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 setelah amandemen keempat disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Nadziroh, 2010). Pemerintah juga mengupayakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan membangun keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pihak yang paling bertanggung jawab pada proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah negara.

EFA mengandung makna bahwa pendidikan itu “ada” untuk semua (Daud Al Kahar, 2019), dalam hal ini pendidikan wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sebuah lembaga yang memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak termasuk siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif dalam mewujudkan EFA.

Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan untuk menyediakan kesempatan belajar bersama-sama kepada anak di sekolah umum namun tetap memperhatikan kebutuhan dan keragaman individual agar anak dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus memberikan pelayanan pada anak dengan mengenyampingkan memandang kondisi fisik, kecerdasan, sosial emosional, ataupun kondisi lainnya (Triyanto & Permatasari, 2016). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) menyatakan

bahwa pendidikan inklusif memiliki tujuan yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, mental, emosional, sosial, ataupun yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, serta menciptakan pelaksanaan pendidikan yang toleran untuk seluruh peserta didik. Selain itu, pendidikan inklusif harus dapat menumbuhkan rasa menerima, mengerti, dan memahami adanya perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya.

Sekolah yang dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif ialah sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sekolah memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif, menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, memiliki fasilitas serta sarana prasarana yang menunjang siswa berkebutuhan khusus, mengembangkan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang diperuntukan untuk siswa berkebutuhan khusus, serta menyiapkan guru kompeten yang telah memperoleh pelatihan khusus (Jauhari, 2017). Dengan adanya sekolah inklusi memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang setara dengan anak normal lainnya tanpa ada diskriminasi. Data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) ditemukan bahwa jumlah ABK di Indonesia sebanyak 1,6 juta anak (Hamid Muhammad, 2017). Dari 1,6 juta ABK di Indonesia, diantaranya hanya sebanyak 18% yang telah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Selain itu, jumlah ABK yang menempuh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) terdata sebanyak 115 ribu anak, dan sekitar 299 ribu ABK bersekolah di sekolah reguler.

Heward (2003) mendefinisikan ABK sebagai anak yang memiliki karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dibandingkan anak pada umumnya yang tidak selalu berkaitan dengan ketidak mampuan mental, emosi, dan fisik. Mangunsong (2009) berpendapat bahwa penyebab penyimpangan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus terdapat pada ciri mental, kemampuan sensori, fisik, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, atau kombinasi dua maupun tiga dari ciri-ciri tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan

bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, serta emosional di atas ataupun di bawah rata-rata.

Anak berkebutuhan khusus memiliki perilaku-perilaku yang berbeda dari anak-anak normal pada umumnya, perilaku-perilaku tersebut termasuk ke dalam gangguan perilaku/perilaku bermasalah (Desiningrum, 2007) dan digolongkan sesuai dengan jenis keterbelakangannya. *Individuals with Disabilities Education Act Amendments* (IDEA) mengklasifikasikan ABK menjadi beberapa bagian. Yaitu Anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak dengan gangguan intelektual, dan anak dengan gangguan fisik. Yang termasuk dalam anak dengan gangguan emosi dan perilaku yaitu tunalaras, *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dan tunawicara. Anak dengan gangguan intelektual yaitu tunagrahita, *slow learner*, autisme, *low disability*, dan *gift and talented student*. Dan yang termasuk anak dengan gangguan fisik yaitu tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu.

Sebagai pembimbing, guru harus memperhatikan bagaimana cara yang tepat dalam menangani berbagai permasalahan perilaku yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus (Nugraheni dkk., 2014). Dengan beragamnya permasalahan siswa berkebutuhan khusus, tentunya dibutuhkan guru kompeten dalam menangani hambatan yang dialami oleh siswa baik kondisi fisik, kemampuan komunikasi, kemampuan intelektual, maupun menurunnya kondisi sosial dan emosional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 41 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus mempunyai tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penanganan guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi, serta guru inklusi dapat dikemukakan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmawanti, haryanti, dkk (2020) dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat kesulitan yang dialami guru dalam pemenuhan hak ABK yang berkaitan dengan interaksi dan komunikasi karena minimnya kontak guru dengan ABK, kurangnya pemahaman

guru mengenai kondisi psikis ABK, serta kurangnya kemampuan guru mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan keingan ABK.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa bentuk upaya yang dapat guru lakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang adalah dengan cara menegur, menasehati, memberi peringatan, memanggil orang tua siswa, dan memberi hukuman ataupun sanksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Novita Dewi (2021) menyatakan bahwa strategi guru dalam mendidik ABK adalah memberikan pembelajaran khusus melalui guru profesional, ketika memberikan bimbingan guru harus lebih bersikap sabar, jeli, kreatif dan tanggap dengan segala perilaku anak berkebutuhan khusus.

Studi pendahuluan dilakukan di lima sekolah inklusi yang berada di Bogor. Empat diantara lima sekolah tersebut tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah sekolah tidak memberikan pelatihan kepada guru maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam menangani siswa ABK. Padahal dalam melaksanakan sekolah inklusi guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kelas serta memiliki kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman peserta didik yang beragam (Armi, 2019). Diantara lima sekolah tersebut, Sekolah Alam Bogor merupakan salah satu sekolah inklusi yang memiliki SDM kompeten dalam menangani siswa ABK.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti akan menganalisis mengenai penanganan ABK di sekolah alam sebagai SD inklusi dengan judul “Penanganan Guru Terhadap Perilaku Bermasalah Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat rumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana penanganan guru terhadap perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus di SD inklusi?”. Rumusan masalah tersebut dapat diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan perilaku bermasalah pada siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Bogor?
2. Apa dampak dari penanganan perilaku bermasalah terhadap siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Bogor?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penanganan guru dalam menyikapi perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus di SD inklusi. Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan penanganan perilaku bermasalah pada siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Bogor.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan dampak dari penanganan perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Alam Bogor.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pemecahan masalah berkaitan dengan bentuk penanganan guru terhadap perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

**Bagi sekolah,** hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi umum mengenai bentuk penanganan guru dalam menyikapi perilaku bermasalah sehingga dapat dijadikan sebagai pengembangan bentuk penanganan.

**Bagi guru,** hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi guru dalam melakukan refleksi diri tentang penanganan perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus. Hal ini bertujuan agar guru dapat

berusaha menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran sebagai upaya untuk menjadi guru yang profesional.

**Bagi peneliti,** penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penanganan guru dalam menyikapi perilaku bermasalah siswa berkebutuhan khusus di sekolah Inklusi.

## **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

### **1.5.1 Bab I Pendahuluan**

Pada bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

### **1.5.2 Bab II Kajian Pustaka**

Pada bab II berisi kajian pustaka yang menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, terdapat penelitian relevan dengan bidang yang diteliti, dan kerangka berpikir.

### **1.5.3 Bab III Metode Penelitian**

Pada bab III menjelaskan dan menguraikan beberapa bagian yang terdiri dari metode dan desain penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, partisipan dan tempat penelitian, bagaimana proses pengumpulan data, sumber data, proses analisis data yang akan dilakukan, serta tahapan penelitian.

### **1.5.4 Bab IV Temuan dan Pembahasan**

Pada bab IV berisi tentang temuan-temuan dalam penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### **1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Pada bab V berisi tentang simpulan akhir dari keseluruhan isi skripsi berdasarkan hasil analisis sekaligus memberikan hal-hal penting dari hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan.